

PERAN KEPEMIMPINAN (POLITIK) DALAM PERUBAHAN GLOBAL

Oleh Nurcholish Madjid

Masyarakat manusia — dalam berbagai bentuk kesatuannya seperti komunitas, umat, negara, maupun sekadar kelembagaan organisasi — adalah kategori dinamis, tidak statis. Karena itu pola kepemimpinan yang baik selamanya harus memperhatikan dinamika masyarakat tersebut. Ungkapan sehari-hari bahwa seorang pemimpin harus pandai membaca tanda-tanda zaman, atau jangan sampai digulung oleh perkembangan zaman, adalah petunjuk populer ke arah ketentuan kepemimpinan yang dinamis itu. Di kalangan para pemikir syariat, kesadaran akan hal ini tercermin dalam kaidah ushul fiqih, “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman”. Dalam al-Qur’an pun ditegaskan bahwa “*Segala sesuatu berubah, kecuali Wajah Dia (Tuhan),*” (Q 28:88). Singkatnya, “*Panta rei*” (segalanya mengalir).

Jika hal tersebut kita terima sebagai hukum umum — yaitu bahwa masyarakat selamanya akan mengalami perubahan dari zaman ke zaman — maka ungkapan “kepemimpinan pada masa perubahan sosial” harus dipahami sebagai acuan kepada kondisi yang sangat khusus, yaitu kondisi perubahan sosial yang besar dan fundamental. Karena kekhususannya itu, maka pola kepemimpinan yang cocok pun memerlukan sejumlah kualifikasi tertentu yang lebih daripada tuntutan pola kepemimpinan dalam kondisi normal.

Sebelum berbicara lebih spesifik, barangkali kita perlu sejenak menyadarkan diri tentang telah terjadinya perubahan besar pada

umat manusia sejak sekitar dua abad terakhir ini, yaitu peralihan umat manusia dari zaman agraris ke zaman teknis. Meskipun perubahan yang terjadi itu benar-benar masih terbatas di dunia Barat, khususnya Eropa Barat Laut dan keturunan mereka di Amerika Utara dan Australia, namun dampaknya meliputi seluruh muka bumi, kecuali daerah-daerah yang sangat terpencil saja. Zaman teknis (*technical age*) sekarang ini memang masih tetap merupakan kelanjutan zaman sebelumnya, yaitu zaman agraris (yang sudah dimulai oleh bangsa Sumeria di lembah Furat-Dajlah [Eufrat-Tigris], Mesopotamia, yaitu Irak sekarang). Tetapi keduanya berbeda secara radikal. Dalam zaman agraris pola perubahan terjadi menurut garis deret hitung (pertambahan) sedangkan dalam zaman teknis (yang juga sering disebut zaman modern) dikenal pola perubahan menurut garis deret ukur (perkalian). Karena itu, perubahan di zaman teknis merupakan kerutinan yang terjadi dalam percepatan dan ukuran yang amat besar, lebih besar berlipat ganda ketimbang yang terjadi pada zaman agraris, yang sekalipun tidak dapat dihindari, masih merupakan keistimewaan.¹

Perubahan dan Strategi Menghadapinya

Hal di atas kita kemukakan sebagai bagian dari usaha kita memahami hakikat perubahan yang kini sedang kita alami. Negeri kita, Indonesia, berada dalam kondisi perubahan yang amat khusus.

¹ Secara matematis, jika faktor perubahan minimal angka 2 (dua), maka sepuluh deret angka itu di zaman agraris akan menghasilkan nilai 20 (dua puluh), sedangkan dalam zaman teknis menghasilkan nilai 1024 (seribu duapuluh empat); dan semakin besar faktor itu semakin besar pula perbedaan nilai yang dihasilkannya dalam deret yang sama. Karena itu, bajak tradisional di desa-desa pertanian relatif tidak banyak berubah sejak dibuat pertama kali oleh bangsa Sumeria sekitar 5000 tahun yang lalu; sementara komputer, misalnya, sejak ditemukannya beberapa waktu lalu sampai sekarang terus-menerus mengalami perubahan yang kecepatan dan ukurannya sungguh fantastis.

Yaitu, *pertama*, dalam kaitannya dengan perubahan mondial, negeri kita sedang berubah dari pola masyarakat agraris ke masyarakat teknis; *kedua*, perubahan itu secara sengaja dan sadar dipacu dan didorong untuk dapat terjadi secepat-cepatnya dan sebesar-besarnya — inilah kenyataan asasi tentang “ideologi” pembangunan kita sekarang. Di sini mungkin hanya sedikit saja tersisa ruang untuk memperdebatkan apakah “ideologi” pembangunan itu absah atau tidak. Sebab, *pertama*, hal itu sudah berjalan selama sekitar seperempat abad; *kedua*, adalah mustahil mengingkari hasil-hasil positif pembangunan yang berupa peningkatan kesejahteraan, sekalipun masih sangat terasa segi penyimpangannya jika dilihat dan sudut cita-cita kemerdekaan untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.”

Karena itu kenyataan perubahan sekarang ini harus dihadapi sebagai “*given*”, dan harus ditetapkan “strategi” menghadapinya. Berkaitan dengan ini, sebagaimana dapat dipahami dari berbagai ulasan para futurolog semacam Toffler dan Naisbit, setiap perubahan sosial adalah juga berarti perbenturan pola-pola hidup sosial tertentu. Dan perbenturan itu tidak bisa tidak akan mengakibatkan berbagai krisis pada berbagai tingkat kehidupan.

Zaman teknis muncul di Barat melalui proses yang panjang dan landai, yaitu sejak zaman *Renaissance* akibat perkenalan Barat dengan peradaban Islam, diteruskan ke zaman Pencerahan yang kemudian juga terbukti sebagai hasil perkenalan dengan Islam lebih lanjut, khususnya di bidang pandangan keagamaan dan kemanusiaan — lalu ke zaman teknis itu sendiri dengan titik-mula di Inggris. Karena prosesnya yang panjang dan landai itu, maka krisis yang diderita oleh Barat akibat perubahan zaman di sana terbentang dalam waktu yang panjang pula, dan secara nisbi tidak mengagetkan.² Maka dibanding dengan pengalaman di Barat

² Ini tidak berarti bahwa dalam bentuk-bentuk tertentu tidak mengerjakan, seperti terjadinya perang-perang keagamaan yang berkepanjangan dan juga Perang Dunia I dan II.

itu, pengalaman krisis kita dapat lebih mengagetkan (*shocking*) dengan dampak yang lebih berat. Sebab, perubahan kita dari pola masyarakat agraris ke pola industrial adalah “mendadak”, tanpa pendahuluan seperti di Barat. Sementara itu, jika kita gunakan sudut pandang Toffler yang memperkenalkan istilah “gelombang”, kita (bangsa Indonesia) sekarang ini, seperti juga banyak bangsa yang lain, sedang mengalami perbenturan tiga gelombang sekaligus. Yaitu, perbenturan antara pola hidup sosial agraris sebagai gelombang pertama, dengan pola hidup sosial industrial sebagai gelombang kedua, ditambah mulai tumbuh dan berkembangnya pola hidup sosial zaman informatika di kota-kota besar. Karena itu, dampak krisis yang timbul juga jauh lebih besar dibanding yang terjadi di Barat. Jika kita masukkan di sini kenyataan bahwa sebagian masyarakat Indonesia bahkan belum memasuki pola hidup agraris (penduduk Irian Jaya, misalnya), maka kita sedang mengalami perbenturan empat gelombang, sejak dari gelombang pra-agraris sampai ke gelombang ketiga.

Mengingat hal-hal tersebut, mau tidak mau perhatian harus kita arahkan pada besarnya krisis akibat perubahan sosial yang muncul dalam bentuk: *Pertama*, “Deprivasi relatif”, yaitu perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal pada orang lain dan kalangan tertentu dalam masyarakat kita akibat tidak dapat mengikuti laju perubahan, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. *Kedua*, “Dislokasi,” yaitu perasaan tidak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Dalam wujudnya yang amat nyata, dislokasi ini dapat dilihat pada krisis-krisis yang dialami oleh kaum marginal atau pinggiran di kota-kota besar akibat urbanisasi. *Ketiga*, “Disorientasi”, yaitu perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat yang ada selama ini tidak lagi dapat dipertahankan karena terasa tidak cocok. Disorientasi ini menyebabkan yang bersangkutan sulit mengenali diri sendiri (kehilangan identitas). *Keempat*, “Negativisme,” yaitu perasaan yang mendorong ke arah pandangan yang serba-negatif kepada susunan

mapan, dengan sikap-sikap tidak percaya, curiga, bermusuhan, melawan, dan sebagainya.

Jika perubahan sosial dengan krisis-krisis yang ditimbulkannya itu tidak diantisipasi dengan baik, akan menciptakan lahan yang subur bagi gejala-gejala radikalisme, fanatisme, sektarianisme, fundamentalisme, eksklusivisme dan lain-lain yang serba-negatif. Antisipasi itu pada urutannya, tentu saja, terkait dengan corak, pola, atau sikap kepemimpinan yang relevan dengan dinamika perubahan itu sendiri. Dan dari penjabaran singkat di atas, kiranya cukup memberi gambaran bahwa kepemimpinan (politik) yang diperlukan dalam masa-masa perubahan sosial yang besar seperti sekarang ini ialah yang didasarkan pada sikap-sikap berikut:

- a. Pengertian secukupnya akan hakikat perubahan zaman sekarang ini dalam dimensi global atau mondialnya (yang meliputi seluruh dunia). Ini penting karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di Tanah Air sesungguhnya merupakan kelanjutan, atau mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan apa yang terjadi di dunia secara keseluruhan. Nilai-nilai sosial politik pun hampir tidak ada yang lepas dari suatu bentuk keterkaitan dengan yang ada di dunia secara keseluruhan. Jika kita bicara tentang demokrasi, keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, keharusan memberantas korupsi, misalnya, kita sesungguhnya juga bicara tentang nilai-nilai yang diterima, dipahami, dihayati, dan dicoba dilaksanakan di mana saja di dunia, sehingga dengan sendirinya menimbulkan berbagai bentuk keterkaitan. Maka dari itu kita harus dapat mengantisipasi adanya sikap seperti “ikut campur” tertentu dari dunia internasional. Maksudnya, dapat memilah mana yang memang menunjukkan kepedulian positif, dan mana yang memang karena nafsu ikut campur saja.
- b. Pengertian yang cukup lengkap tentang budaya bangsa sendiri, sehingga dapat menduga, atau malah mengetahui secara lebih persis, titik-singgung antara pola budaya nasional dengan pola

budaya “mondial”. Persinggungan antara segi-segi tertentu budaya nasional dengan budaya mondial, dalam kerangka perubahan sosial, akan boleh jadi menghasilkan pola kontak yang simbiosis (saling mendukung dan saling menguntungkan), tapi juga boleh jadi mengakibatkan perbenturan yang menimbulkan krisis-krisis. Maka dari pengetahuan tentang titik-titik singgung itu dapat diharap muncul kemampuan membuat antisipasi terjadinya jenis-jenis krisis tertentu akibat perubahan sosial yang cepat dan besar.

- c. Akomodasi positif kepada perubahan, karena perubahan itu sendiri adalah suatu kemestian. Sikap ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan pada diri sang pemimpin sikap-sikap terbuka, menghargai pendapat lain, bebas, berpikir positif, inklusivistik (bersemangat persatuan dan kesatuan), demokratis dan, sedapat mungkin, “*predictable*” sehingga terbina hubungan loyalitas yang positif dan tulus karena dilandasi semangat partisipasi (jadi tidak terpaksa). Pola kepemimpinan yang menghargai individu-individu anggota masyarakat akan merangsang terjadinya motivasi pribadi yang kuat, yang diperlukan untuk pertumbuhan sehat masyarakat itu sendiri. [❖]